



Kebijakan Spasial dalam Pemetaan Persebaran Covid-19 Di Kota Surabaya

Indah Novita Sari ¹, Agus Wahyudi²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i1.28>

CORRESPONDENCE

E-mail: agus.wahyudi@hangtuah.ac.id

KEYWORDS

Public Policy, Spacial, Covid-19.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the spatial policy of mapping the spread of Covid-19 in the Surabaya City Government. This research focuses on the policy environment, policy actors and public policy. The type of research used in this research is descriptive qualitative research with a case study approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the study conclude that spatial policy is a policy issued or approved by the government related to the spatial or spatial distribution of the Covid-19 in the City of Surabaya. This mapping is also felt by the implementing parties to make it easier to provide quick and responsive handling, and can make it easier for the community to receive information and also increase their awareness in their activities. Spatial policies in mapping the spread of Covid-19 in the city of Surabaya are influenced by the policy environment, policy actors, and public policy itself. However, of the three variables, there is one variable that is still not going well, namely the policy environment variable. This is because the high number of Covid-19 cases in Mojo Village is caused by people's behaviors who do not comply with health protocols and underestimate the dangers of Covid-19. So that the role of the Surabaya City Government is needed in providing education and socialization to the public about covid 19.

PENDAHULUAN

Saat ini dunia telah mengalami krisis tata kelola dan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Hampir seluruh negara, terlepas dari status kemajuan ekonomi dan teknologi, serta kehandalan sektor pelayanan kesehatan menghadapi ketidakpastian dalam menangani Covid-19. Sehingga memaksa Pemerintah di berbagai negara mengambil kebijakan yang cenderung bersifat *trial and error*. Pandemi atau epidemi global dari Covid-19 menyebar sangat cepat dan terus meningkat dari waktu ke waktu, hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona, tercatat ada 213 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan Covid-19 tak terkecuali Indonesia.

Pandemi Covid-19 ini dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Virus ini memiliki dampak lebih luas karena karakteristik penyakitnya yang menular langsung antar manusia. Karakteristik virus dan pola penularan yang demikian menyebabkan Covid-19 lebih sulit untuk dikelola, terutama mengingat mobilitas manusia yang bersifat lintas batas negara sangat tinggi. Berdasarkan data dari laman lawancovid-19.surabaya.go.id, Surabaya menjadi daerah penyumbang kasus positif kasus Covid-19 di Jawa Timur. Pada Agustus 2020, Kota Surabaya masuk ke dalam Zona merah, hingga total per 20 Agustus 2020,

total kumulatif positif Covid-19 telah mencapai 11.129 kasus. Pada tanggal yang sama, lonjakan juga terjadi pada pasien Covid-19 yang sembuh dengan jumlah penambahan dua ratus orang, sehingga total telah ada 8.309 orang warga Surabaya sembuh dari Covid-19. Sementara untuk pasien meninggal telah mencapai 873 orang dengan empat tambahan baru pada tanggal yang sama (www.surabaya.liputan6.com, 2020). Hal ini disebabkan meningkatnya tes massal serta minimnya warga dalam menjalankan protokoler kesehatan.

Maka dari itu diperlukan upaya pencegahan dan penyediaan kebutuhan penanganan Covid-19 yang efektif dan konverhensif diantaranya dengan pemetaan dan pendataan penduduk rawan terpapar Covid-19 sehingga sosialisasi dan penanganan serta penentuan kebijakan lanjutan menjadi terarah dan efektif. Pemetaan sendiri ditujukan sebagai upaya visualisasi secara spasial kondisi masyarakat yang dilakukan dengan analisis data-data geografis melalui peta sebaran, sehingga menciptakan informasi yang baik untuk pencegahan Covid-19 khususnya pada skala mikro seperti kecamatan hingga desa atau kelurahan. Peta persebaran akan sangat bermanfaat untuk menganalisis perkembangan kasus Covid-19 disuatu daerah atau wilayah. Oleh karena itu, peta sebaran menjadi salah satu hal terpenting dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Dengan adanya peta sebaran tersebut membuat warga lebih tenang dan tidak gampang panik dengan kabar ada pasien positif di lingkungannya. Bahkan, diharapkan pula bisa lebih meningkatkan kehati-hatiannya dalam menjalankan aktivitasnya. Selain itu tujuan dari penelitian ini juga untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana kebijakan spasial dalam pemetaan persebaran Covid-19 dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil selanjutnya.

Penelitian ini didukung dari hasil kajian yang dilakukan oleh (Yusuf, 2020) yang menjelaskan bahwa bahwa potensi yang besar dalam penyebaran Covid-19 dikecamatan lembang yaitu pada wilayah- wilayah dengan mobilitas dan sebaran yang tinggi didesa tersebut terlihat bahwa wilayah dengan aksebilitas tinggi menjadi wilayah yang potensial terpapar Covid-19. Analisis data pun menggambarkan bahwa pada beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan sebaran Covid 19 yang cukup massive memungkinkan terjadinya kerentanan terhadap penularan yang semakin tinggi. Seperti pada wilayah desa lembang dimana selain merupakan “ibu kota” kecamatan yaitu tempat transaksi dan pemerintahan yang tingkat keramaiannya tinggi menjadikan wilayah tersebut sangat rentan terpapar covid-19.

Lain halnya dengan penelitian menurut (Melin et al., 2020) penulis menjelaskan bahwa kemampuan pengelompokan peta yang mengatur dirinya sendiri, dapat secara spasial mengelompokkan negara-negara yang mirip menurut kasus virus korona mereka, dengan cara ini dapat menganalisis negara mana yang memiliki kemiripan dan dengan demikian dapat memperoleh manfaat dengan menggunakan strategi serupa dalam menangani penyebaran virus. Sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan analisis spasial dengan penggunaan peta pengorganisasian mandiri tanpa pengawasan untuk mengelompokkan negara-negara serupa dalam memerangi pandemi Coronavirus.

Begitupula dengan penelitian dari (Kusuma & Sukendra, 2016) menjelaskan bahwa pola penyebaran virus DBD menunjukkan pola berkerumun atau *clustered* terutama pada kelurahan dengan kepadatan penduduk yang tertinggi. Sebaran kejadian virus DBD berdasarkan kepadatan penduduk dengan analisis buffer menunjukkan bahwa semua kelurahan berpotensi untuk terjadi penularan virus DBD. Oleh sebab itu pemanfaatan ruang dalam memetakan persebaran pada sebuah virus, terutama pada virus Covid-19 yang saat ini sedang terjadi dinilai sangat penting karena dapat memberikan masukan bagi Pemerintah khususnya pada penelitian ini yaitu pemerintah Kota Surabaya dalam menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil selanjutnya.

Penelitian ini menggabungkan teori milik (Dunn, 2003) yaitu kebijakan publik dengan teori milik Levebrev (1991) yaitu ruang (*spatial*). Dimana teori kebijakan publik milik Dunn ini terdapat tiga variabel diantaranya lingkungan kebijakan, pelaku kebijakan, dan kebijakan publik itu sendiri. Sedangkan teori ruang (*spatial*) milik Leveberv(1991) terdapat tiga proses untuk mewujudkan 3 (tiga) dimensi ruang tersebut yaitu praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasional. Namun pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian dalam menemukan permasalahan di lapangan adalah kebijakan publik milik Dunn.

Kebijakan publik merupakan suatu pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan- keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah(Dunn, 2003). Selain itu Woll (1966) juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai sejumlah aktivitas

pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

METODE

Penelitian tentang “Kebijakan Spasial Dalam Pemetaan Persebaran Covid-19 Di Kota Surabaya”, dilakukan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh secara *purposive sampling* serta teknik triangulasi digunakan dalam pengumpulan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagian Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan ini lebih berfokus pada penciptaan situasi lingkungan kebijakan karena diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Dalam hal ini dapat diukur dari segi ekonomi, sosial, budaya.

a. Ekonomi

Berdasarkan hasil analisa penulis seharusnya secara ekonomi anggaran dana yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan Covid-19 tidak hanya membuat program kebijakan saja seperti pada website lawancovid19 dimana website ini dapat memberikan informasi terkait peta persebaran Covid- 19 namun kenyataannya banyak kasus tertinggi Covid-19 seperti di Kelurahan Mojo. Oleh sebab itu anggaran dana yang dikeluarkan seharusnya lebih memprioritaskan untuk menurunkan angka persebaran Covid-19 misalnya dengan rutin memberikan masyarakat vitamin, penyemprotan disinfektan di setiap rumah warga dan sebagainya.

b. Sosial

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa beberapa hal penyebab peningkatan kasus Covid-19 dipengaruhi, pertama faktor varian baru Covid-19 yang muncul seperti Alpha, Beta dan Delta. Kedua, faktor kejenuhan yang menyebabkan masyarakat lalai dan kurang mendisiplinkan diri dari protokol kesehatan. Ketiga, vaksinasi yang belum maksimal sehingga belum tercapainya *herd imunity* atau kekebalan kelompok.

c. Budaya

Berdasarkan hasil analisis dari penulis bahwa secara budaya, banyaknya aktivitas cangkrukan di masa pandemi secara usia lebih banyak pada usia remaja. Hal ini ada kaitannya dengan warung kopi ataupun cafe sebagai tempat berkumpulnya anak muda, yang menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai tempat rawan kerumunan dan berpotensi menjadi klaster baru. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya aktivitas cangkrukan ini di latar belakanginya munculnya rasa jenuh atau bosan karena segala aktivitas dilakukan dirumah saja atau bisa jadi mereka pengangguran. Hal inilah yang dapat menghambat upaya untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Kelurahan Mojo.

2. Pelaku Kebijakan

Menurut Dunn (2000) pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) merupakan para individu atau kelompok yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dandipengaruhi oleh keputusan pemerintah (Asmara, 2021). Elemen pelaku kebijakan dalam penelitian ini adalah dinas kesehatan dan diskominfo sebagai instansi vertikal dibawah Pemerintah Kota Surabaya, dengan indikator hubungan antar aktor dan sikap pelaksana.

a. Hubungan Antar Aktor

Berdasarkan hasil analisis penulis menyatakan bahwa adanya tingkat kejelasan dalam melakukan komunikasi dinilai penting, dimana dinkes dan diskominfo diharapkan mampu untuk mengkomunikasikan hasil dari kebijakan kepada masyarakat mengenai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Sehingga terlihat dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak pelaksana yang bertanggung jawab terkait website lawancovid-19.surabaya.go.id yaitu dari pihak dinkes dan diskominfo Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik dan lancar, dilihat dari data yang setiap hari selalu *update* terkait informasi penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya sehingga

bisa menjadi data yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan juga masyarakat dapat lebih waspada terhadap bahaya Covid-19.

b. Sikap Pelaksana (*disposisi*)

Berdasarkan hasil analisa penulis terlihat bahwa pihak pelaksana yaitu Dinas Kesehatan dan juga Diskominfo Kota Surabaya telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemetaan persebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Hal itu dibuktikan dari pemahaman yang dimiliki oleh pihak pelaksana telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) dimulai dari dinkes yang melakukan *tracing* di setiap kelurahan, kemudian data dari hasil *tracing* tersebut diberikan kepada diskominfo untuk ditampilkan di website lawancovid-19.surabaya.go.id.

3. Kebijakan Publik

Variabel ini memiliki 2 indikator yaitu tujuan dan isi dari kebijakan publik. Dengan demikian variabel kebijakan publik ini merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat.

a. Tujuan

Berdasarkan hasil analisis penulis menyatakan bahwa dalam hal SOP dan tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini dinas kesehatan telah berupaya untuk menangani persebaran Covid-19 dengan SOP dan tujuan kebijakan yang sudah jelas seperti yang tertuang pada Kemenkes Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

b. Isi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa untuk memetakan persebaran Covid-19 di Surabaya, Dinas Kesehatan mengambil data dari New All Record (NAR). Dimana hasil test swab dari puskesmas, laboratorium dan rumah sakit dikirimkan ke laboratorium pemeriksa yang sudah diakui oleh Kemenkes, di Surabaya namanya lapesda atau laboratorium pemeriksa daerah. Laboratorium pemeriksa itu yang menentukan seseorang itu positif atau negatif. Kemudian hasil tersebut di *entry* ke dalam NAR. Setelah itu data dari NAR akan ditarik oleh dinas kesehatan Surabaya yang kemudian hasilnya diberikan ke puskesmas sesuai domisili.

Setelah itu hasil dari data tersebut akan diberikan kepada Diskominfo untuk dipublikasikan di website lawancovid-19.surabaya.go.id sebagai bentuk informasi data yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih waspada terhadap kondisi penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diperoleh beberapa faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Spasial Dalam Pemetaan Persebaran

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Adanya program kampung tangguh	Penyerapan dana dalam penanganan Covid-19 yang dialokasikan kurang optimal
Adanya program vaksinasi	Dekat dengan beberapa rumah sakit besar, beberapa tenaga medis yang bertempat tinggal disana
data yang selalu update setiap hari melalui website lawancovid-19.surabaya.go.id	Pasar utama dan ruko jadi tempat berkerumun banyak orang
Kemampuan pihak pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP	Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang meremehkan bahaya Covid-19

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
-	Masih banyaknya masyarakat khususnya anak muda yang nekat untuk tetap cangkrukan atau nongkrong di warung kopi

Sumber: diolah peneliti 2022

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dikemukakan di atas maka bisa disimpulkan bahwa kebijakan spasial merupakan kebijakan yang dikeluarkan atau disahkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan ruang atau spasial, hal ini juga berkaitan dengan pandemi Covid-19. Sehingga dapat di representasikan dengan pemetaan persebaran Covid-19 dimana tujuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam penanganan Covid-19.

Kebijakan spasial dalam pemetaan persebaran Covid-19 di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari dua variabel yang sudah berjalan dengan baik yaitu kebijakan publik sudah jelas dan pelaku kebijakan sudah melaksanakan dengan baik. Namun pada variabel lingkungan kebijakan masih belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan tingginya angka kasus Covid-19 di Kelurahan Mojo yang disebabkan oleh perilaku-perilaku masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan dan meremehkan bahaya Covid-19.

REFERENSI

- Asmara, S. P. (2021). *Analisis Kebijakan Pelarangan Sepeda Motor Melintas Pada Jalan MHThamrin -Medan Merdeka Barat Di DKI Jakarta*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/IIAP/article/view/6750/3313>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. http://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf
- Kusuma, A. P. &, & Sukendra, D. M. (2016). Analisis Spasial Kejadian Demam Berdarah Dengue Berdasarkan Kepadatan Penduduk. *Unnes Journal of Public Health*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.15294/ujph.v5i1.9703>
- Lefebvre, Henry. 1991. *The Production of Space*, diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith. Basil Blackwel. Oxford.
- Melin, P., Monica, J. C., Sanchez, D., & Castillo, O. (2020). Analysis of Spatial Spread Relationships of Coronavirus (COVID-19)
- Yusuf, Arif (2020). Pemetaan Covid-19 di kecamatan Lembang. https://www.academia.edu/43447736/Pemetaan_Covid_19_di_kecamatan_Lembang?auto=citations&from=cover_page